

---

## **ANALISIS RELASI ANTAR KOMUNITAS DALAM KONFLIK SOSIAL DI KOTA AMBON ( *Studi Kasus Stain Jembatan Jodoh Air Besar Negeri Batu Merah*) Kecamatan Sirimau Kota Ambon**

Oleh:

**Adam Sopalatu<sup>1)</sup>, La Jaali<sup>2)</sup>**

Email: [adamsopalatu9@gmail.com](mailto:adamsopalatu9@gmail.com), [lajaali1974@gmail.com](mailto:lajaali1974@gmail.com)

### **Abstrak**

Konflik merupakan suatu bentuk perjuangan dalam memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan otoritas. Tujuan dari pihak yang terlibat dalam konflik tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingan mereka. Dampak konflik seringkali bersifat destruktif, terutama dalam bentuk kekerasan seperti perang, yang menyebabkan kerusakan dan kerugian materi dan non-materi. Konflik dianggap traumatik dan mengganggu stabilitas serta keseimbangan yang diidamkan. Konflik sosial yang terjadi di Kota Ambon beberapa tahun kemarin terlebih khusus di kawasan Stain Jembatan Jodoh menjadi perhatian bersama agar tidak meluas lagi karna dapat menghambat segala aktivitas kantoran, Pendidikan dan kehidupan kemasyarakatan lainnya, agar keadaannya dapat menciptakan rasa aman, nyaman dalam suasana kekeluargaan.

**Kata Kunci:** *Konflik Sosial, Relasi Antar Komunitas, Resolusi Konflik, Kota Ambon, Negeri Batu Merah*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara majemuk, memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dianggap sebagai tantangan yang hanya dapat diatasi jika semua pihak memiliki tujuan yang sama atau jika satu pandangan lebih dominan daripada yang lain. Oleh karena itu, perbedaan ini kerap menimbulkan konflik sosial karena berbagai kepentingan masyarakat berupaya untuk tetap bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, setiap masyarakat di dunia ini pasti akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah suatu proses yang berkelanjutan, menunjukkan bahwa setiap komunitas, pada hakikatnya, akan mengalami transformasi secara terus-menerus. Perubahan tersebut dapat mencakup nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku organisasi, struktur lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, distribusi kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan sebagainya. Pendidikan menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi pemahaman

---

<sup>1)</sup> Adam Sopalatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon

<sup>2)</sup> La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti

manusia terhadap perubahan. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seseorang cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih mampu memilih arah perubahan yang positif. Perubahan sosial yang melibatkan seluruh komponen masyarakat cenderung hanya dapat terwujud melalui konflik.

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sejak awal peradaban, perbedaan kepentingan, nilai, dan pandangan hidup telah menjadi sumber utama munculnya ketegangan antar individu maupun antar kelompok. Dalam konteks masyarakat modern, konflik sosial tidak hanya muncul karena perbedaan ekonomi, tetapi juga karena faktor politik, budaya, dan agama. Dengan memahami konflik sosial, kita tidak hanya mempelajari penyebab pertentangan, tetapi juga mencari jalan menuju perdamaian dan keadilan sosial di berbagai lapisan masyarakat, baik dalam lingkup keluarga, komunitas lokal, maupun di tingkat Nasional dan Global. Fenomena ini merupakan bagian dari dinamika sosial yang menunjukkan bahwa manusia memiliki pandangan, kepentingan, dan kebutuhan yang beragam. Meski konflik sering dipandang sebagai hal negatif, dalam kenyataannya, konflik juga dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang konstruktif jika dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, memahami konflik sosial secara mendalam menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan bersama.

Sumartono (2019), mengindikasikan bahwa transformasi sosial yang menyeluruh memerlukan adanya gesekan atau pertentangan dalam masyarakat. Konflik dianggap sebagai unsur yang mendasar dan tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Di setiap sudut dunia, manusia berpotensi menghadapi konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan. Seiring perkembangan peradaban manusia, konflik telah menjadi warna khas dalam kehidupan sosial yang tak dapat dihapuskan. Meskipun sering dianggap negatif, namun konflik dapat menjadi pemicu perubahan dan mendorong masyarakat untuk mencari solusi serta meraih perkembangan yang lebih baik.

Penanganan konflik menjadi kunci penting dalam mencapai keberhasilan organisasi, dan peran pemimpin dalam proses ini sangat menentukan. Sebaliknya, jika konflik tidak ditangani dengan cermat dan mengalami eskalasi terbuka, konsekuensinya dapat merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat perkembangan yang diinginkan. Terpenting bagi pemerintah atau para pemimpin dalam masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam mengelola konflik secara efektif. Langkah-langkah yang diambil dalam mengelola konflik harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial dan kepentingan masyarakat. Pemimpin yang mampu mengelola konflik dengan bijaksana dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian, mencegah eskalasi konflik yang merugikan, dan memastikan bahwa tujuan organisasi atau masyarakat dapat tercapai tanpa hambatan yang dapat menimbulkan potensi konflik. Oleh

---

<sup>1)</sup> *Adam Sopalatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon*

<sup>2)</sup> *La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti*

karena itu, kemampuan mengelola konflik merupakan salah satu aspek kritis yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer untuk mencapai kesuksesan dan stabilitas dalam organisasi.

### **1. Jenis-jenis Konflik Sosial**

Konflik sosial memiliki banyak bentuk, tergantung pada latar belakang dan konteks terjadinya. Beberapa jenis utama konflik sosial antara lain:

a. Konflik antar individu

Konflik ini terjadi karena perbedaan pendapat, ego, atau kepentingan pribadi antara dua orang. Meskipun tampak sederhana, jika tidak diselesaikan, konflik antarindividu bisa berkembang menjadi konflik kelompok.

b. Konflik antar kelompok

Terjadi ketika dua atau lebih kelompok memiliki pandangan atau kepentingan yang saling bertentangan. Misalnya, konflik antara kelompok buruh dan pengusaha, atau antara komunitas etnis yang berbeda.

c. Konflik antar kelas sosial

Konflik ini muncul karena adanya ketimpangan ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah. Karl Marx menyebutnya sebagai konflik antara *borjuis* dan *proletar*, di mana satu pihak berusaha mempertahankan kekuasaan ekonomi sementara pihak lain berjuang untuk keadilan.

d. Konflik politik dan ideologi

Konflik jenis ini sering muncul dalam ranah pemerintahan dan kebijakan publik, seperti perebutan kekuasaan antarpolisi politik atau perbedaan pandangan mengenai sistem pemerintahan.

e. Konflik antar budaya dan antar agama

Terjadi karena perbedaan nilai, keyakinan, atau tradisi. Konflik semacam ini sering kali bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan perpecahan sosial yang luas jika tidak dikelola dengan baik.

### **2. Penyebab Konflik Sosial**

Penyebab konflik sosial sangat beragam, bergantung pada situasi sosial dan struktur masyarakat yang terlibat. Namun, secara umum, beberapa faktor utama penyebab konflik sosial antara lain:

a. Ketimpangan ekonomi

Ketika sebagian masyarakat menikmati kemakmuran sementara sebagian lainnya hidup dalam kemiskinan, perasaan ketidakadilan sosial akan muncul dan memicu konflik.

b. Perbedaan nilai dan ideologi

Setiap individu dan kelompok memiliki sistem nilai yang berbeda. Ketika perbedaan ini bertemu dalam situasi sosial tertentu, benturan pandangan dapat menimbulkan konflik.

---

<sup>1)</sup> Adam Sopalatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon

<sup>2)</sup> La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti

- c. Perebutan sumber daya  
Sumber daya seperti tanah, air, pekerjaan, atau kekuasaan sering menjadi pemicu utama konflik, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas.
- d. Komunikasi yang buruk  
Salah paham dalam komunikasi dapat memperuncing perbedaan kecil menjadi pertentangan besar.
- e. Kesenjangan sosial dan diskriminasi  
Perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, atau status sosial sering menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan.
- f. Perubahan sosial yang cepat  
Transformasi sosial, seperti modernisasi dan globalisasi, dapat mengguncang nilai-nilai tradisional dan menciptakan ketegangan antara generasi atau kelompok sosial.

### 3. Dampak Konflik Sosial

Konflik sosial dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat.

Dampak negatif antara lain:

- Terjadinya kekerasan, kerusakan, dan korban jiwa.
  - Hancurnya hubungan sosial yang harmonis.
  - Meningkatnya ketegangan dan ketidakpercayaan antarwarga.
  - Terganggunya stabilitas politik dan ekonomi.
- Namun, dampak positif juga bisa muncul, seperti:
- Munculnya kesadaran akan ketidakadilan sosial yang sebelumnya diabaikan.
  - Terbukanya peluang untuk perubahan sosial yang lebih adil.
  - Menguatnya solidaritas di antara kelompok yang memperjuangkan tujuan yang sama.

Dalam konteks ini, konflik sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme penyangga bagi reformasi sosial. Ia menjadi ruang untuk mengoreksi kebijakan, sistem, atau tatanan sosial yang tidak seimbang. Georg Simmel mengemukakan bahwa konsep mengenai masyarakat ditekankan kepada pentingnya interaksi dan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Simmel memandang masyarakat lebih daripada sebagai suatu kumpulan individu yang menunjuk pada pola interaksi timbal balik individu. Konflik adalah sebuah kalimat yang tidak asing buat kita sepanjang Sejarah peradaban manusia itu sendiri. Manusia lahir dan berkembang bersamaan dengan sebuah peraban untuk melihat kemajuan manusia baik dari segi ekonomi, sosial budaya maupun segi politik.

Di dalam relasi sosial pasti terdapat sebuah interaksi sosial karena hal tersebut merupakan kunci dari relasi sosial dalam semua kehidupan sosial. Interaksi sosial

---

<sup>1)</sup> Adam Sopalatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon

<sup>2)</sup> La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti

akan terus berjalan pada kehidupan masyarakat karena interaksi merupakan sebuah proses di mana setiap orang saling berkomunikasi dan mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain karena melalui interaksi ini, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang terjadi karena adanya interaksi sosial. Dapat dikatakan bahwa hasil dari interaksi yang menimbulkan tingkah laku seseorang kepada orang lain sehingga menyebabkan relasi atau hubungan diantara keduanya. Aspek tersebut apabila dilihat secara luas yaitu mencakup dari berbagai bidang kehidupan, baik pola interaksi sosial, jaringan sosial, dan hubungan kekuasaan. Hal ini akan menimbulkan sikap saling mempengaruhi antar satu individu dengan individu yang lain, maka suatu relasi akan terjalin ketika tiap-tiap orang mampu memperkirakan secara tepat sama halnya dengan tindakan yang akan diterima seseorang dimasa mendatang dari pihak lain. Di dalam relasi sosial pasti terdapat sebuah interaksi sosial karena hal tersebut merupakan kunci dari relasi sosial dalam semua kehidupan sosial. Interaksi sosial akan terus berjalan pada kehidupan masyarakat karena interaksi merupakan sebuah proses di mana setiap orang saling berkomunikasi dan mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Untuk memenuhi interaksi dalam relasi sosial terdapat syarat-syarat di dalamnya, antara lain:

1. Kontak sosial.

Kontak sosial dapat dilakukan melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Kontak sosial secara langsung dilakukan dengan bertemu, berbicara atau bersikap secara langsung. Misalnya dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum, bahkan berbicara satu sama lain yang saling berhadapan. Simmel berpendapat bahwa berlangsungnya pertemuan secara tatap muka dan berinteraksi antara orang-orang dari kelompok berbeda dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik.

2. Komunikasi

Komunikasi dapat dimaknai sebagai proses menafsirkan orang lain, baik terhadap informasi, gerak-gerik atau bahkan sikap dan perilaku orang lain pembicaraan yang diberikan orang lain kepada kita. Hal ini menjadi dasar dalam berinteraksi karena apabila tidak ada komunikasi, maka manusia tidak akan saling memberikan reaksi satu sama lain. Misalnya ketika seseorang tersenyum maka dapat ditafsirkan sebagai sikap ramah, sehingga memicu orang lain untuk bersikap baik, namun apabila seseorang bersikap sinis maka akan memicu untuk orang lain berprasangka buruk, dan begitu sebaliknya.

Perbedaan suku, agama, RAS, dan antargolongan (SARA) sebagai kondisi nyata yang diwarisi turun temurun, dan merupakan unsur-unsur kekayaan yang

---

<sup>1)</sup> *Adam Sopalatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon*

<sup>2)</sup> *La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti*

mewarnai budaya bangsa Indonesia, namun hal ini juga merupakan ancaman potensial bagi eksistensi bangsa hingga terjadinya konflik antar golongan. Menurut Thomas Lickona (dalam Najmina, 2018) ada sepuluh tanda dari perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa, yaitu: 1) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, 2) Ketidakjujuran yang membudaya, 3) Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orangtua, guru dan pemimpin, 4) Pengaruh peer group terhadap tindak kekerasan, 5) Meningkatnya kecurigaan dan kebencian, 6) Penggunaan bahasa yang memburuk, 7) Penurunan etos kerja, 8) Menurunnya rasa tanggung jawab sosial individu dan warga negara, 9) Meningginya perilaku merusak diri, 10) Semakin hilangnya pedoman moral.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang memfokuskan analisis pada masalah yang terjadi di Stain Jembatan Jodoh Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Studi kasus memungkinkan spesifikasi yang mendalam terhadap masalah dalam konteks tertentu, seperti individu, kelompok budaya, atau potret kehidupan. Lokasi penelitian di dua tempat Stain Jembatan Jodoh dan Masjid Arema pertigaan Alfamidi ini memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap konflik antar kelompok masyarakat. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu mulai 11 September hingga 11 Oktober 2023. Variabel yang diteliti mencakup berbagai aspek konflik, seperti kronologi konflik, faktor penyebab konflik, bentuk konflik, dan resolusi konflik, dinamika konflik tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Materialisme dan Post-Materialisme.**

Arya Hadi Dharmawan dalam tulisan *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)* mengataakan bahwa sejak era-reformasi dan transformasi kehidupan sosial-politik via paham demokratisme mulai menggelinding dan dijalankan secara “konstruktif” pada tahun 1998 (masa kejatuhan Orde Baru/ ORBA), maka sejak saat itu pula perjalanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia memasuki tahapan baru yaitu tidak pernah terlepasnya warga dari carut-marut konflik sosial. Konflik sosial yang selama 30 tahun rejim ORBA di“tabu”kan oleh negara dan warga masyarakat, seolah kini menjadi tindakan-nyata yang sah, lazim dan justifiable dalam sistem tata-kehidupan berasaskan demokrasi. Benturan sosial demi benturan sosial berlangsung dengan mengambil bentuk aneka-rupa serta menyentuh hampir di segala aspek (“frame of conflict”) kehidupan masyarakat (konflik agraria, sumberdaya alam, nafkah, ideologi, identitas-kelompok, batas teritorial, dan semacamnya). Satu hal yang perlu dicatat adalah bawa apapun bentuk benturan sosial yang berlangsung akibat dari konflik sosial, maka akibatnya akan selalu sama yaitu stress sosial, kepedihan (bitterness), disintegrasi sosial yang

<sup>1)</sup> Adam Sopalatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon

<sup>2)</sup> La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti

seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka aset-aset material dan non-material. Kehancuran asset-asset non-material yang paling kentara ditemukan dalam wujud “dekapitalisasi” modal sosial yang ditandai oleh hilangnya trust di antara para-pihak yang bertikai, rusaknya networking, dan hilangnya compliance pada tata aturan norma dan tatanan sosial yang selama ini disepakati bersama-sama). Seolah semua yang telah dengan susah payah dibangun dan ditegakkan oleh masing-masing warga yang bertikai, dengan mudah diakhiri begitu saja karena konflik sosial.

Kendati demikian, bukan berarti post-materialism-based social conflict tidak ada sama sekali di Indonesia. Berbagai macam demonstrasi massa yang menuntut agar negara secara konsisten menegakkan agenda demokrasi, desentralisme, penyelamatan lingkungan hidup, perang terhadap korupsi, perjuangan hak-hak perempuan, dan sebagainya adalah wujud riil dari hadirnya dinamika konflik sosial berbasis post-materialisme di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Meningginya intensitas dan keluasan konflik sosial sejak era reformasi di Indonesia, tidak dapat disangkal telah mencengangkan banyak kalangan.

## 2. Arena Konflik: Tiga Ruang Kekuasaan

Konflik sosial bisa berlangsung pada aras antar-ruang kekuasaan. Terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu “ruang kekuasaan negara”, “masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial”, dan “sektor swasta” (Bebbington, 1997; dan Luckham, 1998). Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan. Selanjutnya Gambar 1 berikut dapat diamati sebagai berikut.



Gambar 1. Tiga Ruang dimana Konflik Sosial Dapat Berlangsung (diadopsi dengan modifikasi dari Bebbington, 1997)

Dengan mengikuti model konflik sosial berperspektifkan ruang-kekuasaan dari Bebbington (1997) sebagaimana skemanya tergambar pada Gambar 1 di atas, maka konflik sosial antar “pemangku kekuasaan” dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadapan-melawan negara dan sebaliknya. Dalam hal konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat atas kebijakan publik yang diambil oleh

<sup>1)</sup> Adam Soplatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm.Publik STIA ALAZKA Ambon

<sup>2)</sup> La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti

negara/pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat secara umum.

2. Konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial melawan swasta dan sebaliknya. Contoh klasik dalam hal ini adalah “perseteruan berdarah” yang terus berlangsung (bahkan hingga kini) antara komunitas lokal melawan perusahaan pertambangan multi-nasional di Papua. Kasus serupa juga ditemui dalam “Tragedi Pencemaran Teluk Buyat” yang memperhadapkan warga lokal yang menderita kesakitan akibat pencemaran air terus-menerus dari limbah tailing aktivitas penambangan emas oleh perusahaan swasta asing di Sulawesi Utara di awal dekade 2000an.
3. Konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadapan-hadapan melawan negara dan sebaliknya. Berbagai tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Negara dalam mengawal jalannya sebuah kebijakan, biasanya memakan biaya sosial berupa konflik tipe ini secara tidak terelakkan.

Dinamika konflik sosial antar-ruang kekuasaan akan berlangsung makin kompleks, manakala unsur-unsur pembentuk sebuah ruang kekuasaan tidak merepresentasikan struktur sosial dengan atribut/ identitas sosial yang homogen. Di ruang kekuasaan negara, termuat sejumlah konflik sosial internal baik yang bersifat latent (terselubung terpendam) maupun manifest (mewujud-nyata). Dalam hal ini, contoh yang paling mudah terjadi adalah konflik sosial yang berlangsung dalam praktek manajemen pemerintahan akibat olah-kewenangan dalam pengendalian pembangunan yang berlangsung secara hierarkhikal antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Konflik yang lebih banyak mengambil bentuk “konflik kewenangan” tersebut mengemuka sejak rejim pengaturan pemerintahan desentralisasi berlangsung penuh sejak Undang-Undang (UU) No. 22/1999 dilanjutkan dengan UU No. 32/2004 sebagai konsekuensi OTDA. Konflik antar pemerintah. Konflik sosial horisontal, juga berlangsung antar departemen sektoral di pemerintahan pusat, ataupun antara satu pemerintah kabupaten berhadapan-hadapan melawan pemerintah kabupaten lain dalam suatu kebijaksanaan tertentu. Di ruang kekuasaan masyarakat sipil atau kolektivitas sosial, berlangsung konflik sosial yang tidak kalah intensifnya antara sesama kolektivitas sosial dalam mempertentangkan suatu obyek yang sama. Hal ini dipicu oleh cara pandang yang berbeda-beda dalam memaknai suatu persoalan. Perbedaan mazhab atau ideologi yang dianut oleh masing-masing pihak bersengketa menjadikan friksi sosial dapat berubah menjadi konflik sosial yang nyata. Beberapa contoh aras konflik ini bisa disebutkan antara lain adalah, tawuran antar warga yang dipicu oleh hal-hal yang dalam “kehidupan normal” dianggap sederhana (sepele), seperti masalah batas wilayah administratif (desa atau kabupaten) yang hendak dimekarkan sebagai konsekuensi OTDA. Sementara itu, di ruang ini juga bisa berlangsung konflik sosial

---

<sup>1)</sup> *Adam Sopalatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon*

<sup>2)</sup> *La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti*

yang melibatkan perbedaan identitas sosial komunal (ethno-communal conflict) seperti ras, etnisitas dan religiositas.

Dalam perspektif tentang konflik sosial oleh Bebbington (1997), di mana warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadapan-melawan negara dan sebaliknya. Dalam hal konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat atas kebijakan publik yang diambil oleh negara/pemerintah, dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat secara umum. Konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial melawan swasta dan sebaliknya. Contoh klasik dalam hal ini adalah “perseteruan berdarah” yang terus berlangsung (bahkan hingga kini) antara komunitas lokal melawan perusahaan pertambangan multi-nasional di Papua. Konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadapan-melawan negara dan sebaliknya.

Dahrendorf (1958, 1959), mengatakan bahwa pendirian teori konflik dan teori fungsional disejajarkan. Menurut para fungsionaris masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang. Tetapi menurut Dahrendorf, dan teori konflik lainnya setiap masyarakat setiap saat pada proses perubahan. Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teoritis konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap diintegrasikan dan perubahan. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai, dan moral. Dikatakan oleh Dahrendorf bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian; *pertama* teori konflik, *kedua* teori konsensus. (1) Teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan (2) Teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat Masyarakat Bersama di hadapan tekanan itu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dahrendorf dalam tesis sentralnya bahwa, dalam memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Gagasannya bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi.

1. **Otoritas** dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi karena itu ada dua kelompok konflik yang dapat terbentuk di dalam setiap asosiasi, *pertama* Kelompok yang memegang posisi otoritas dan *ke dua* kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu yang arah dan substansinya saling bertentangan. Di dalam setiap asosiasi orang yang berada pada posisi dominasi berupaya mempertahankan *status quo*, sedangkan orang yang berada dalam posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan. Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini tak selalu perlu

<sup>1)</sup> Adam Sopalatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon

<sup>2)</sup> La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti

disadari oleh pihak subordinat dan superordinate dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan superordinate dan subordinat adalah objektif dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang dilekatkan pada posisi.

2. **Kelompok, Konflik dan Perubahan**, selanjutnya Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. *Tipe pertama*, Kelompok semu (*quasi group*) atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Kelompok semu ini adalah calon anggota tipe ke dua. Ke dua, yakni kelompok kepentingan, kedua kelompok dilukiskan sebagai berikut; “Mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan (Dahrendorf, 1959:180). Dari berbagai jenis kelompok kepentingan itulah muncul *kelompok konflik* atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Selanjutnya dikatakan bahwa konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Di bawah kondisi yang ideal tak ada lagi variabel lain yang diperlukan. Tetapi, karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Singkatnya dikatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Bila struktur itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai tindakan kekerasan, akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba.

Dengan berkembangnya rasa solidaritas, maka terjalinnya hubungan antar anggota-anggota dari berbagai kelompok, hal ini dapat menetralkan terjadinya konflik-konflik sosial dan tidak khawatir akan terjadinya fanatisme sempit serta sentimen yang bersifat primordial. Disamping itu, interaksi yang dilakukan dalam kehidupan bersama mengacu kepada nilai-nilai umum yang dijunjung oleh semua warga masyarakat. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan sosial pada masyarakat plural/majemuk, antara lain;

1. Adanya pertentangan paham antara para anggota kelompok tentang tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapai, yang pada mulanya merupakan pedoman kelompok.
2. Norma-norma sosial yang ada tidak lagi dapat dirasakan membantu anggota kelompok (masyarakat) dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut.
3. Sangsi-sangsi sosial yang dipersiapkan dan yang telah menjadi kebiasaannya semulatelah semakin memudar atau semakin tidak diperhatikan lagi.
4. Banyak penyimpangan-penyimpangan dari anggota kelompok yang mendapat dukungan dari anggota-anggota yang lain, sehingga kemudian timbul tanda-tanda adanya kebiasaan baru yang dapat disepakati bersama.

<sup>1)</sup> Adam Soplatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon

<sup>2)</sup> La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti

Stain Jembatan Jodoh merupakan komunitas masyarakat yang ditempati bukan saja satu atau dua suku, namun dihuni oleh bermacam suku, yaitu; Buton, Bugis, Jawa, Palembang, Seram Bagian Barat(SBB), Seram Bagian Timur(SBT), Seram Selatan, Kailolo, Kabau, Kei dll. Konflik sosial yang terjadi di Kota Ambon beberapa tahun kemarin terlebih khusus di kawasan Stain Jembatan Jodoh menjadi perhatian dari Bapak Wali Kota Ambon yang turun langsung ke tempat kejadian dalam penyelesaian pertikaian diantara ke dua kelompok yang bertikai. Sebelum terjadinya pertikaian pada tahun 1999 masyarakat Maluku hidup berdampingan Islam dan Kristen selalu aman, tentram dan damai. Konflik tahun 1999 menjadi perhatian serius bagi kalangan orang tua dan anak muda dalam melihat kejadian tersebut sebagai pembelajaran untuk generasi selanjutnya.

Konflik dengan sendirinya juga menyebabkan keterpurukan masyarakat secara sosial dan ekonomi dalam keberlangsungan hidup. Terjadi konflik beberapa bulan kelmarin antara komunitas atau suku/ orang Kailolo dan komunitas suku/ orang Geser, merupakan suatu gesekan yang membutuhkan perhatian Pemerintah Provinsi dan Kota Ambon dalam memperhatikan, mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan persoalan di masyarakat yang telah jenuh dengan terbatasnya persoalan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga konflik tersebut merupakan suatu bentuk pembiaran berkepanjangan karna kelompok-kelompok kepentingan selalu melakukan tindakan dalam konflik agar tujuan mereka tercapai. Sedangkan membangun toleransi dengan menggunakan pendekatan sistem budaya, maksudnya dalam melaksanakan segala kegiatan berpedoman dari nilai-nilai umum yang berlaku bagi setiap anggota suatu komunitas.

Sebagaimana dalam beberapa teori yang dikemukakan di atas bahwa relasi antar komunitas dapat terjadi secara cepat dan kapan saja, karena konflik yang terjadi diantara ke dua komunitas yaitu suku Kailolo dan suku Geser dapat memunculkan gesekan-gesekan dalam kelompok-kelompok secara teratur. Menurut para fungsionaris masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang. Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini tak selalu perlu disadari oleh pihak subordinat dan superordinate dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan superordinat dan subordinat adalah objektif dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang dilekatkan pada posisi. Untuk itu langkah-langkah penyelesaian konflik yang harus dilakukan sebagai berikut ;

1. Mempercepat pemulihan dalam penyelesaian konflik dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, ketimpangan ekonomi, perebutan sumber daya, komunikasi yang buruk, kesenjangan sosial dan diskriminasi, serta perubahan sosial yang cepat.

---

<sup>1)</sup> Adam Soplatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon

<sup>2)</sup> La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti

2. Menelusuri keterkaitan antara kelompok-kelompok sosial agar penanganan konflik dapat terwujud.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dalam hubungan manusiawi khususnya ikatan kekerabatan Pela dan Gandong.
4. Kepada pihak keamanan dalam mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi agar masyarakat merasa nyaman, aman dan dapat beraktifitas dengan baik.
5. Pemerintah Provinsi dan Kota secara berkala melakukan pengkajian agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan tentram dan mudah dapat teratasi.

### **Kesimpulan**

Konflik yang terjadi di Stain Jembatan Jodoh sendiri tidak hanya terjadi antar etnis/suku Kailolo dan Geser , tetapi juga melibatkan etnis/suku lain seperti Kei, Seram, Pelauw, Kabau dan juga ada suku lain. Yang menjadi perhatian kita adalah menyampaikan pesan-pesan yang positif agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Dalam relasi sosial antar etnis/suku peran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan secepatnya diatasi, sebab selama ini, masyarakat hidup berdampingan tidak menimbulkan gesekan dan peran-peran lembaga kemasyarakatan lebih diutamakan, melalui mediasi oleh mediator netral, menjalin kerjasama dengan organisasi keagamaan, melakukan sosialisasi dan dialog terbuka, serta meningkatkan deteksi dini oleh Pemerintah Desa dan RT/ RW serta diteruskan ke aparat penegak hukum sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan, sehingga kerukunan terjaga, kebersamaan, sinergi dan kolaborasi.

### **Daftar Pustaka**

- Arya Hadi Dharmawan, *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*. Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006.
- Berry, David, 1982, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. disunting dan dihantar oleh: Paulus Wirutomo, CV. Rajawali, Jakarta.
- Bebbington, A. 1997. *Social Capital and Rural Intensification: Local Organizations and Islands of Sustainability in the Rural Andes*. *Geographic Journal*, Vol. 163/2, pp. 189-197.
- George Ritzer, Douglas J. Goodman “ *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 153-157.
- Kana Lailatul Ahadiyah. *Relasi Sosial Antara Kyai Non Politik Dan Kyai Politik Di Komunitas Pedesaan*. *Jurnal S1 Sosiologi Universitas Airlangga*. 2018. hal 2–21.
- Malik, I. et. al. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumberdaya Alam*. Yayasan Kemala. Jakarta.

---

<sup>1)</sup> *Adam Sopalatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm.Publik STIA ALAZKA Ambon*

<sup>2)</sup> *La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti*

Sumartono. (2019). *Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik*. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis, 5(1), 1–17.

Tadjoeddin, M. Z. 2006. *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy*. UNDP. Jakarta.

Popy Latule<sup>1</sup>, W. S. Pinoa<sup>2</sup>, dan Susan E. Manakane “Analisis Konflik Antara Kelompok Masyarakat Di Maluku Tengah (Studikasuk Di Negeri Porto Dan Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Geografi, Lingkungan & Kesehatan* ISSN : 3025 - 9134 (Online).

---

<sup>1</sup>) *Adam Sopalatu, Dosen Tetap Prodi, Ilmu Adm. Publik STIA ALAZKA Ambon*

<sup>2</sup>) *La Jaali, Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti*